

MINYAK SAWIT LESTARI DENGAN PEDOMAN ISPO

Henry Marpaung*

Dalam 5 (lima) tahun terakhir ini terjadi pergeseran pasar (*market*) minyak nabati dunia, dari sebelumnya didominasi konsumsi minyak kedelai yang diproduksi di negara maju (Eropa) menjadi minyak sawit yang diproduksi di negara berkembang (Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Nigeria, Ghana dll). Dari sisi suplai tahun 2007, pasokan produksi Indonesia menjadi yang terbesar (44 persen) menggeser pasokan Malaysia (41 persen) untuk konsumsi minyak sawit dunia. Harga minyak mentah (*crude oil*) yang naik di luar perkiraan juga membuat minyak sawit selalu menjadi pembicaraan sebagai substitusi dalam bentuk *biofuel*. Data-data tersebut mengukuhkan bagaimana strategisnya komoditi minyak sawit (*Elaeis guineensis* Jacq) dalam perekonomian Indonesia termasuk provinsi Sumatera Utara.

Memang, provinsi ini dalam sejarahnya adalah daerah yang pertama sekali (tahun 1911) mengelola komoditi kelapa sawit dikelola secara komersial/ industri dari sebelumnya yang hanya berupa tanaman hias di Kebun Raya Bogor. Sekarang, 100 tahun kemudian hampir di semua kabupaten di Sumatera Utara tersebar perkebunan kelapa sawit berupa perkebunan rakyat (408.699 Ha), perkebunan swasta (342.954 Ha) dan perkebunan Negara/BUMN (296.093 Ha). Data-data yang dikutip dari Dr. Tungkot Sipayung dalam bukunya "Perkebunan Kelapa Sawit dalam perekonomian dan lingkungan hidup Sumatera Utara" bahwa di Sumatera Utara terjadi peningkatan pangsa ekspor kelapa sawit dan turunannya dari hanya sekitar 30 persen pada tahun 2000 menjadi 49 persen pada tahun 2009 dari total ekspor Sumatera Utara. Bahkan pada tahun 2008 kontribusi "agribisnis kelapa sawit" pada *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) Sumatera Utara mencapai 70 persen. Jenis pekerjaan di perkebunan yang bersifat padat karya pun sangat membantu penyerapan tenaga kerja di Sumatera Utara dengan struktur tenaga kerja yang masih didominasi pendidikan rendah. Maka pemilihan tema "Sawit Sahabat Rakyat" oleh GAPKI (Gabungan

Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) pada semarak memperingati 100 tahun kelapa sawit beberapa waktu lalu sangat tepat dan menjadi komitmen bersama untuk mewujudkannya.

Melihat fakta bahwa komoditi minyak sawit ini strategis dalam pasar minyak nabati dunia dan peluang sebagai substitusi fuel (*biofuel*), kemudian Indonesia menjadi pemasok utama di dunia, maka tidak berlebihan jika kita membuat konklusi dengan meminjam bahasa salah satu eksekutif perusahaan kelapa sawit di Medan "Bahwa Komoditi kelapa sawit adalah anugerah Tuhan yang luar biasa untuk Indonesia yang harus dipertahankan dan ditingkatkan".

Kita perlu melihat pengalaman sejarah komoditi-komoditi unggulan Indonesia yang pernah berjaya di dunia seperti rempah-rempah, beras dan karet. Keberhasilan Indonesia pada komoditi tersebut sebagai produsen utama gagal bertahan malah untuk sebagian komoditi kita menjadi importir. Kita berharap hal ini tidak terjadi pada komoditi kelapa sawit yang sudah menjadi primadona ekonomi kita saat ini. Kontribusi dari setiap pemangku kepentingan (*stakeholder*) tentu sangat dibutuhkan dalam meningkatkan usaha ini baik pemerintah, pengusaha, pekebun, bank, masyarakat, LSM lingkungan dengan perannya masing-masing. Misalnya, untuk meningkatkan produksi program intensifikasi adalah pilihan utama daripada pengembangan lahan, akhir akhir ini para peneliti memperkenalkan **visi 35/26** (35 ton TBS per Ha per tahun dan rendemen 26 Persen). Para produsen sedang giat merancang kawasan yang berorientasi industri hilir yang mempunyai nilai tambah lebih tinggi daripada hulu, pemerintah juga meningkatkan anggaran untuk infrastruktur jalan dan pelabuhan. Tetapi yang tidak kalah pentingnya dan itu sudah disadari oleh banyak pihak adalah meningkatkan kredibilitas produk sawit dari sisi pengelolaan sistem keberlanjutan (*Sustainability*). Beberapa tahun yang lalu diperkenalkan Prinsip dan Kriteria RSPO (*Roundtable Sustainable Palm Oil*), puluhan perusahaan di Indonesia mendapat sertifikasi tersebut walaupun sifat pemenuhan RSPO adalah

* Alumni IPB, Auditor Sistem Manajemen dan RSPO/ISPO pada Badan Sertifikasi Nasional, Tinggal di Medan

sukarela (*voluntary*). RSPO adalah standar yang dibuat berdasarkan kesepakatan/*roundtable* para pemangku kepentingan seperti konsumen, produsen dan LSM lingkungan internasional. RSPO yang bersekretariat di Kuala Lumpur ini menjadi jembatan atau wadah komunikasi para pihak yang kepentingan untuk menyamakan persepsi tentang konsep keberlanjutan (*sustainability*). Sebagai "kesepakatan" tentu adalah peluang dominasi dari *stakeholder* tertentu yang mempunyai "kekuasaan" dan menguasai media untuk menyudutkan produsen tertentu, seperti yang terjadi pada perusahaan kelapa sawit besar pada akhir tahun yang lalu. Alternatif konsep keberlanjutan lain yang baru saja disosialisasikan adalah pedoman ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*).

Pedoman *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO)

Dalam *launching* ISPO di medan pada beberapa waktu yang lalu menekankan bahwa Sertifikasi ISPO bukanlah untuk mengganti/menyaingi Sertifikasi RSPO. Prinsip dan kriteria ISPO muncul sebagai inisiatif dari pemerintah atas kesadaran/deklarasi bahwa pengelolaan sumberdaya alam termasuk perkebunan kelapa sawit harus dilakukan secara berkelanjutan (*sustainable*). Dalam hal terbitnya pedoman ISPO menteri pertanian menyatakan sebagai amanat konstitusi UUD pasal 33 ayat 3 bahwa *Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*.

Secara garis besar pedoman ISPO didasarkan pada 4 hal yaitu kepatuhan hukum, kelayakan usaha, pengelolaan lingkungan dan hubungan sosial yang dirumuskan dalam prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) Sistem perijinan dan manajemen perkebunan; 2) Penerapan pedoman teknis budi daya dan pengolahan kelapa sawit; 3) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan; 4) Tanggung jawab terhadap pekerja; 5) Tanggung jawab sosial dan komunitas; 6) Pemberdayaan ekonomi masyarakat; 7) Peningkatan usaha secara berkelanjutan. Ketujuh prinsip itu dirinci ke dalam 27 kriteria dan 117 Indikator yang lengkapnya dapat dilihat pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 19 Tahun 2011.

Di banyak perkebunan negara dan swasta besar, berdasarkan pengalaman kami pemenuhan terhadap prinsip tersebut sudah relatif memadai kecuali dalam beberapa kriteria yaitu **mekanisme sengketa lahan dan kompensasi, mekanisme pemberian informasi, pelestarian keanekaragaman hayati (*biodiversity*), identifikasi kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi (NKT), Mitigasi Emisi gas rumah kaca (GRK) dan pemberdayaan masyarakat adat/lokal**. Sedangkan untuk prinsip-prinsip lainnya hanya perlu perbaikan dokumentasi agar pemenuhan buktinya dapat ditunjukkan dan konsisten.

Sertifikasi ISPO sifatnya wajib (*mandatory*) dan perusahaan-perusahaan kelapa sawit harus sudah diaudit paling lambat 31 Desember 2014. Karena sifatnya yang wajib maka ada sanksi bagi yang tidak memenuhi, sanksinya tergantung pada peraturan-perundangan yang tidak dipenuhi. Perusahaan yang memenuhi syarat untuk diajukan untuk dinilai Badan Sertifikasi adalah kebun kelas I, II dan III berdasarkan pengkelasan/penilaian usaha kebun dari dinas pertanian berdasarkan Permentan No 07 Tahun 2009. Penilaian pemenuhan ISPO sendiri dilakukan oleh Badan Sertifikasi yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan hasil audit diverifikasi oleh komisi ISPO sebagai keputusan akhir kelulusan sertifikasi.

Strategi dan Langkah Persiapan Sertifikasi ISPO

Seperti juga sistem-sistem lain seperti ISO 9000, 14000 dan SMK3 sebelum mengajukan sertifikasi, perlu melakukan pembenahan di internal perusahaan. Salah satu Langkah-langkah yang dapat digunakan adalah: *Pertama*) Melakukan pelatihan pemahaman prinsip dan kriteria ISPO kepada beberapa staf yang dipersiapkan sebagai tim internal. Bahasa dalam prinsip dan kriteria ISPO sangat jelas dan *clear*, sehingga mudah dipahami; *Kedua*) Para personal yang terlatih melakukan Analisa kesenjangan (*Gap Analysis*) untuk menguji tingkat pemenuhan perusahaan terhadap ISPO pada tahap awal. Berdasarkan gap analisis akan ditemukan secara rinci tentang pemenuhan untuk masing-masing indikator. Perusahaan membuat prioritas perbaikan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan oleh perusahaan; *Ketiga*). Perusahaan melakukan perbaikan berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan,

sebaiknya selalu dibuat batas waktu dan penanggungjawab perbaikan. Biasanya Perbaikan dikategorikan dalam beberapa hal antara lain: a) Legalitas tanah/areal, b) Pelaporan kepada otoritas pemerintah, c) Penilaian Area nilai konservasi tinggi (NKT) dan *biodiversity* yang memerlukan ahli tertentu, d) Masalah ketidakadaan/ kekurangan dokumen, e) Sosialisasi/ pemahaman yang kurang terhadap konsep keberlanjutan. *Keempat*) Setelah perbaikan dianggap sudah memenuhi, perusahaan mengajukan sertifikasi kepada Badan Sertifikasi sesuai dengan pilihannya. Ruang lingkup yang disertifikasi adalah kebun sendiri dan pabrik kelapa sawit (PKS), perusahaan berkewajiban mensosialisasikan ISPO kepada para pemasok TBS dari perkebunan lain jika menerima TBS selain kebun sendiri. Masa sertifikat ISPO berlaku selama 5 tahun sebelum dilakukan penilaian ulang (*re-*

assesment) dan sekali dalam setahun dilakukan audit pengawasan (*surveillance*).

Akhirnya, yang menjadi kunci utama suksesnya implementasi ISPO ini adalah komitmen pemilik/ top manajemen perkebunan. Strategi tersebut di atas hanya bisa berjalan efektif jika pemilik/top manajemen mempunyai komitmen penuh untuk memenuhi ISPO. Maka ke depan kita dengan bangga mengatakan kepada dunia bahwa semua minyak sawit Indonesia adalah minyak sawit lestari, perkebunan minyak sawit yang dikelola dengan mematuhi hukum, melaksanakan praktek perkebunan terbaik serta memperhatikan lingkungan dan sosial. Ujian akhir program ini tetap pada penerimaan pasar (*market*), beberapa tahun ke depan kita akan melihat respon konsumen terhadap konsep pembangunan minyak sawit berkelanjutan yang diprakarsai Indonesia ini.

Melintas Batas Produktivitas di Kebun Air Batu

Menghasilkan produksi TBS lebih dari 23 ton TBS per tahun pada Tahun Pertama produksi (TM-1) tentunya merupakan harapan setiap pekebun. Kebun Air Batu PT. Perkebunan Nusantara IV yang telah lebih dari 80 tahun membudidayakan kelapa sawit saat ini telah menancapkan milestones baru pencapaian produktivitas aktual TM-1 di wilayahnya. Keberhasilan tersebut tentunya patut diapresiasi sebagai buah dari kerja keras dan semangat mencapai harapan. Buku ini berisi tentang sejarah perkebunan kelapa sawit di Kebun Air Batu PTPN IV dan beberapa kiat yang mendukung tercapainya produktivitas tinggi di tersebut.

Judul buku : Melintas Batas Produktivitas di Kebun Air Batu
Penulis : Dhimas Wiratmoko, Edy Sigit Sutarta, Suroso Rahutomo, dan Witjaksana Darmosarkoro
Jumlah hal. : 20 halaman
Tahun terbit : 2011
Penerbit : Pusat Penelitian Kelapa Sawit
ISBN : 978-979-8529-98-6

